



Optimalkan Partisipasi RT, RW, dan Kampung di Kota Yogyakarta

Belanja Dana Keistimewaan Harus Mampu Ciptakan Lapangan Kerja

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menerima berbagai aspirasi masyarakat menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan dana keistimewaan DIY di Kota Yogyakarta. Dia mendapatkan masukan agar ke depan masyarakat di tingkat RT, RW dan kampung harus lebih banyak dilibatkan. "Ditingkatkan partisipasinya," ujar Eko kemarin (25/9).

DIA mengungkapkan, kebijakan pembangunan, penggunaan APBD maupun dana keistimewaan harus disusun dan dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, Pemda DIY harus mengoptimalkan peran serta masyarakat. "Saya mendengar dari para pengurus RT, RW dan kampung termasuk tokoh-tokoh masyarakat selama ini tidak pernah diajak bicara dan didengarkan aspirasinya. Khususnya tentang pembahasan dana keistimewaan DIY," beber anggota DPRD DIY dari daerah pemilihan (dapil) Kota Yogyakarta ini.

"Setiap rupiah belanja APBD dan dana keistimewaan harus mampu menciptakan lapangan kerja," pinta dia dengan nada serius. Meski bisa dikatakan terlambat, mulai tahun kemantren di Kota Yogyakarta mendapatkan kesempatan mengkonsolidasikan usulan dan pelaksanaan dana keistimewaan melalui mekanisme bantuan khusus keuangan (BKK). Dasarnya merujuk Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Soal keterlambatan itu, Eko menyebut setelah UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY berusia 10 tahun barulah kemantren atau dulu disebut Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota



PARTISIPASI: Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan mulai tahun ini kelurahan di Kota Jogja diberi kewenangan menerima BKK. Peran RT, RW dan kampung dalam pembangunan keistimewaan lebih optimal.



PEKA DAN ASPIRATIF: Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengajak semua elemen Berkolaborasi membangun Kota Jogja. Rakyat ditempatkan sebagai subjek dan bukan lagi objek pembangunan.

Yogyakarta.

Revisi atau perubahan itu dengan menyesuaikan pasal 5 Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

"Ke depan, perda kelembagaan di Kota Yogyakarta harus menambah tugas dan fungsi urusan keistimewaan di

kelurahan," kata Eko yang juga menjabat ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini.

Kelurahan, sambung Eko, menjadi lembaga yang diberi kewenangan menerima BKK. Dengan penambahan fungsi itu, dia yakin peran dan partisipasi masyarakat di RT, RW dan kampung bisa optimal. Pembangunan keistimewaan DIY di Kota Jogja sebaiknya berbasis

kampung. Itu sesuai kesejarahan kelembagaan asli.

Sebelumnya, upaya mengoptimalkan peran RT, RW dan kampung juga disinggung Eko saat rapat koordinasi DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta bersama PAC dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta.

Ikut hadir dalam acara tersebut Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi dan Ketua DPRD DIY Nuryadi serta Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiymoko. Rapat koordinasi berlangsung pada Sabtu (24/9).

Dalam kesempatan itu, Eko kembali menegaskan partainya secara konsisten berjuang mewujudkan tujuan bernegara, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan. Dia juga mendorong pemerintah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan, siap bertemu dan berdialog dengan masyarakat. Kapanpun dan di manapun, Nuryadi membuka pintu seluas-luasnya. "Baik sebagai ketua dewan maupun ketua DPD," tegasnya. Harapan itu juga disampaikan Nuryadi kepada pengurus



Saya mendengar dari para pengurus RT, RW dan kampung termasuk tokoh-tokoh masyarakat selama ini tidak pernah diajak bicara dan didengarkan aspirasinya. Khususnya tentang pembahasan dana keistimewaan DIY."

EKO SUWANTO
Ketua Komisi A DPRD DIY

partai, anggota fraksi maupun kader. Mereka harus rajin turun ke bawah. "Ikut membantu menyelesaikan masalah di masyarakat," ajaknya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi ingin melalui rapat koordinasi itu dapat mendorong semua pemangku kepentingan di pemerintah daerah dan wakil rakyat bekerja sama. Forum itu juga dilainnya penting membangun kolaborasi, koordinasi, konsolidasi dan sinkronisasi. Masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai objek. Tapi sebagai subjek atau pelaku.

Strategi dan program pro rakyat dilanjutkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta 2023. Temanya "Peningkatan Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat".

Prioritasnya peningkatan kualitas SDM, peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan. Kemudian peningkatan perekonomian, pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi. Ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, perlu aspiratif terhadap aspirasi masyarakat. Peka terhadap kebutuhan rakyat. Kedua, pemerintah perlu melibatkan segenap masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. "Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek dan bukan objek pembangunan," ujar mantan Inspektur DIY ini. (kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005